

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam menerapkan akuntansi pemerintahan, Undang-Undang sangat diperlukan, yang berfungsi sebagai dasar untuk implementasi dan dasar hukum. Dasar hukum digunakan berguna sebagai tolak ukur sebuah legalitas formal suatu aktivitas yang berkaitan dengan akuntansi suatu lembaga, perusahaan maupun dengan akuntan. Akuntansi pemerintahan adalah suatu bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba (Kieso et al (2014) dalam Dwi Martani 2016:4). Sistem sendiri merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan lainnya, dan memiliki fungsi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen suatu lembaga atau instansi guna memudahkan pengelolaan keuangan (Mulyadi 2016).

Suatu sistem akuntansi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna baik bagi pihak internal dan eksternal. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh suatu perusahaan atau lembaga akan berbeda dengan perusahaan atau lembaga lainnya. Hal ini tergantung dari

apa yang dibutuhkan perusahaan atau lembaga lainnya serta ruang lingkup sebuah perusahaan atau lembaga. Sistem akuntansi harus dapat diterapkan dengan baik dan tepat agar tidak menyimpang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Siregar, 2015). Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual artinya SAP mengakui pendapatan laporan operasional, beban, aset, utang, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran negara atau daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip yang digunakan untuk memperbaiki sistem yang telah digunakan sebelumnya, sehingga informasi yang ada di dalam laporan keuangan menjadi sangat akurat dan meminimalisir kesalahan yang bisa saja terjadi.

b. Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Mahmudi (2018:92), prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang telah disajikan. Prinsip

standar akuntansi pemerintah ini yang nantinya akan digunakan sebagai indikator penelitian untuk mengukur pemahaman standar akuntansi pemerintah di OPD Kabupaten Sleman. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu.

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib untuk menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran

pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah. Namun demikian, bila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

2. Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal ini yang tidak terdapat nilai historis dapat menggunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi

Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran (LRA) wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar sebuah transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan real dari ekonomi tersebut, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Jika substansi transaksi tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Periodisitas

Agar kinerja suatu entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan yaitu tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester.

6. Konsistensi

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode yang lain oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan ini bukan berarti tidak bolehnya terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode akuntansi yang dipakai dapat digantikan dengan syarat. Adapun syarat yang dapat menggantikan tersebut yaitu metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode lama. Pengaruh atas

perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka suatu laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, unsur kehati-hatian sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.1.2. Pemahaman Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh pegawai yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai, bukan jaminan mutlak karena sangat sulit untuk membangun sistem yang sempurna. Namun dari itu, Sistem Pengendalian Internal menurut Mulyadi (2017:129) meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian ini menekankan pada tujuan yang hendak dicapai, bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasi secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2017:129) yaitu (1) menjaga aset organisasi atau perusahaan, (2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif. Pengendalian internal akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan juga ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan sebuah data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan pada perusahaan dan akan menghasilkan laporan yang dapat dipercaya. Pengendalian administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

c. Elemen Pada Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pemerintahan memerlukan pengendalian untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Elemen-elemen ini akan digunakan sebagai indikator penelitian untuk mengukur Sistem Pengendalian Internal di OPD Kabupaten Sleman. Di bawah ini adalah elemen dari SPIP diantaranya.

1. Lingkungan Pengendalian

Pemimpin sebuah instansi pemerintah wajib untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan sebuah perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian

intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di dalamnya, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan sebuah instansi pemerintahan wajib untuk melakukan penilaian risiko yang terdiri dari:

- a) Identifikasi Risiko
- b) Analisis Risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kerumitan suatu permasalahan, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi sebuah pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas sebuah informasi wajib diselenggarakan secara efektif yang dapat dicapai dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta

mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pimpinan instansi pemerintah wajib untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan sebuah informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas sebuah informasi tersebut wajib untuk diselenggarakan secara efektif yang dapat dicapai dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

2.1.3. Pemahaman Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2017:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi sebuah keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan dengan standar akuntansi yang berlaku agar sebuah laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang disusun prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh pemakai informasi.

b. Indikator Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki diantaranya.

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa pada masa lalu ataupun pada masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengorekso hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikal.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2. Pengembangan Hipotesis dan Penelitian terdahulu

2.2.1. Pengembangan Hipotesis

Dalam hipotesis penelitian ini akan dijelaskan tentang *sistem pengendalian internal pemerintah* dan *standar akuntansi pemerintah* dalam mempengaruhi *kualitas laporan keuangan* di Kabupaten Sleman.

2.2.1.1 Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern pemerintah dalam pelaksanaannya wajib mencapai empat tujuan, yaitu (1) efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) pengamanan aset negara, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengendalian intern ini sendiri antara lain untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tercermin melalui informasi laporan keuangan yang dilaporkan.

Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kontrol yang baik akan menjamin laporan yang disajikan ke masyarakat benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dalam penelitian Ranny Hannafi (2017) menyatakan bahwa

“semakin tinggi Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah, akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Dalam penelitian Iman Jaya Hia (2020) menyatakan bahwa “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Pengelolaan aset daerah masing-masing berpengaruh positif signifikan”, hal ini berarti apabila Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan pengelolaan Aset ditingkatkan maka akan meningkatkan kualitas sebuah laporan keuangan.

Dalam penelitian Indria Nurani (2018) menyatakan bahwa “hanya dimensi penilaian risiko yang terdapat dalam sistem pengendalian intern pemerintahan saja yang tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan hanya dimensi andal saja yang tidak dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah dikarenakan sedikitnya jawaban responden”. Dalam penelitian Emy Pevitasari (2018) menyatakan bahwa “pemahaman SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh SPIP dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain”. Dalam penelitian Hartono, dkk. (2020) menyatakan bahwa “hasil analisis data koefisien antara efektivitas SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan hasil yang signifikan”.

2.2.1.2. Pengaruh SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tujuan dari pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yakni pelaporan yang berkualitas sehingga LPKD yang disusun oleh masing-masing pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik tertentu. Sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 karakteristik yang dimaksud dalam LKPD adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakter tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Hannafi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman dalam SAP akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian Emy Pavitasari (2018) menyatakan bahwa “pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”. Hal ini terbukti dari persamaan regresi, korelasi dan determinasi yang telah dilakukan oleh Emy. Namun tidak semuanya dipengaruhi oleh variabel SAP saja, tetapi tetap dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam penelitian oleh Iman Jaya Hia (2020) menyatakan bahwa “implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah”. Hal ini dikarenakan pemahaman yang memadai mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan bisa dilihat dari rata-rata jawaban kuesioner yang telah dilakukan oleh Iman Jaya Hia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartono, dkk. (2020) menyatakan bahwa “hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel bebas X_1 , (Penerapan SAP), variabel X_2 (Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dan variabel X_3 (Kompetensi SDM) terhadap variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan) secara parsial dan simultan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu khususnya penelitian yang dilakukan di organisasi Pemerintah terhadap variabel yang diteliti.

2.2.2. Penelitian Terdahulu

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baik tentunya akan berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah juga merupakan prinsip yang digunakan untuk memperbaiki sistem yang telah digunakan sebelumnya, sehingga informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut menjadi akurat dan meminimalisir kesalahan. Pegawai yang tidak dapat memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, sehingga laporan keuangan memiliki kualitas yang rendah. Berikut penelitian terdahulu yang peneliti ambil guna memperkuat penelitian pada skripsi ini.

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ranny Hannafi (2017) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabelnya yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perbedaan penggunaan salah satu variabel. Pada penelitian ini menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang berbeda. Perbedaan lainnya juga terletak pada metode analisis data.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Emy Pavitasari (2018) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal” menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabelnya yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemahaman Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Sleman sedangkan penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Kendal.
3. Penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor

Desa Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara” oleh Indria Nurani Br. Purba (2018) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabelnya yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perbedaan penggunaan salah satu variabel. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Iman Jaya Hia (2020) yang berjudul “Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dan Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Barat” memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Pengelolaan aset daerah masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabelnya yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan perbedaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perbedaan penggunaan salah satu variabel. Perbedaan lainnya juga terletak pada metode analisis data.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hartono, dkk. (2020) yang berjudul “Pengaruh SAP, Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan” menyatakan bahwa SAP, efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah, dan SDM secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabelnya yaitu sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah. Sedangkan perbedaannya terletak pada salah satu variabel sumber daya manusia.

2.3 Hipotesis Penelitian

Good and Scales menyatakan bahwa hipotesis merupakan suatu taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk dan langkah-langkah selanjutnya.

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah.

- H1 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H2 : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.